

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Atmasasmita, Romli, 1982, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Cimahi, Binacipta.
- Faal, M, 1990, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1981, **Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi dan Siti Tahayu, 1983, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia**, Jakarta, Akademika Press Indo.
- Hamzah, Andi, 1983, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hart, A.C.'t dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, **Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, 1987, **Upaya Hukum Dalam Perakara Pidana**, Jakarta, Bina Aksara.
- Hamzah, Andi, 1993, **Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia**, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya,
- Nusantara, Abdul Hakim. G, 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana**, Jakarta, Djambatan.
- M. Husein, Harun, 1987, **Surat Dakwaan, Teknik, Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya**, Jakarta .....

- Prints, Darwan, 1989, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Jakarta, Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delik Korupsi (UU 31 Tahun 1999)**, Bandung, Mandar Maju.
- Soesilo, R, 1979, **Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Bogor, Politeia.
- Soeparman, H. Parman, 2007, **Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan**, Jakarta, Aditama.
- Sumaryanti, 1987, **Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas**, Jakarta, BinaAksara.
- Sutarto, Suryono, 1991, **Hukum Acara Pidana**, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widjaja, Gunawan, 2001, **Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

#### **PERUNDANG - UNDANGAN :**

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

